

Mempersiapkan Pemilu 2009 Sebagai Puncak Pembelajaran Politik Masyarakat

M. Hatta Rajasa¹

Pendahuluan

Pemilu 2009 sebentar lagi akan dilaksanakan oleh segenap rakyat Indonesia. Pemilu yang diselenggarakan tahun ini merupakan Pemilu ketiga, sejak era reformasi bergulir dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila sebelumnya, Pemilu 1955 sering dianggap sebagai Pemilu yang demokratis dalam sejarah Republik Indonesia dan selalu menjadi referensi, maka penyelenggaraan Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 lalu, telah menambah khazanah akan keberhasilan pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan diikuti dengan penuh antusias oleh segenap rakyat di seluruh pelosok tanah air.

Pemilu 1999 sebagai buah reformasi, telah berhasil membuka gerbang kebebasan dalam penyelenggaraan

¹ Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.

demokrasi. Rakyat benar-benar menjadi penentu. Hasil Pemilu tidak lagi ditentukan oleh kemauan penguasa, namun ditentukan oleh kemauan rakyat. Pada Pemilu 1999 inilah tingkat partisipasi rakyat dan keikutsertaan partai politik mencapai jumlah yang signifikan. Namun, hal yang sangat menggembirakan dan sekaligus membanggakan, adalah bahwa pelaksanaan Pemilu 1999 tersebut bisa berjalan adil, jujur, dan demokratis. Pemilu 1999 telah menjadi bukti bahwa tingkat kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi bangsa Indonesia telah mengalami kemajuan yang luar biasa.

Kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi bangsa Indonesia makin maju dan makin dinamis ketika melaksanakan Pemilu 2004. Betapa tidak, pada pelaksanaan Pemilu 2004 itu, telah terjadi perubahan fundamental, yang diwujudkan pada penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Bila di semua Pemilu sebelumnya hanya anggota legislatif yang dipilih langsung, sedangkan presiden dan wakil presiden, dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka dalam pemilu 2004, presiden dan wakil presiden pun dipilih secara langsung oleh rakyat. Rakyatlah yang memilih pemimpinnya di eksekutif dan wakilnya di legislatif secara langsung.

Pelaksanaan dan hasil Pemilu 2004 menjadi bukti, sekaligus penegasan, bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cepat dalam melakukan proses pembelajaran demokrasi serta telah mampu menjadikan demokrasi sebagai urat nadi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan demi keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan proses Pemilu itu telah membuat bangsa Indonesia saat ini dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat internasional dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk memelihara sekaligus mempertahankan prestasi itu, maka seluruh komponen bangsa harus bertekad menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2009 mendatang. Kualitas penyelenggaraan Pemilu 2009, harus jauh lebih baik dari sebelumnya. Kualitas yang tidak hanya dalam konteks tingkat partisipasi, keamanan dan ketertiban belaka, namun

yang utama adalah pematangan dalam menjalankan demokrasi. Pelaksanaan dan hasil Pemilu 2009 nantinya tidak hanya menjadi sebuah pembuktian kedewasaan berdemokrasi tetapi juga harus menjadi pembuktian kematangan berpolitik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat.

Pada makalah ini akan diulas dengan tentang sejumlah upaya pemerintah untuk mempersiapkan Pemilu 2009 sehingga perhelatan demokrasi itu akan mampu memfasilitasi dan memperluas ruang pembelajaran politik bagi masyarakat. Kita ingin agar Pemilu 2009 menjadi puncak pembelajaran politik yang menjadikan masyarakat makin dewasa dalam berdemokrasi maupun berpolitik.

Kedewasaan Berdemokrasi dan Kematangan Berpolitik

Secara umum, demokrasi telah diakui sebagai sistem politik yang berhasil. Dibandingkan dengan fasisme, pemerintahan monarki absolut dan pemerintahan otoriter, yang semuanya terbukti kurang efektif, dalam menciptakan pemerintahan yang baik, maka demokrasi terbukti lebih mampu memberikan hasil optimal dalam membangun kesejahteraan dan keadilan. Demokrasi juga terbukti lebih sanggup dalam menjamin penghormatan atas hak asasi manusia di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Demokrasi juga terbukti lebih mampu membuka ruang untuk adanya penyelesaian damai atas berbagai konflik kepentingan yang timbul dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui demokrasi, maka seorang Barack Hussein Obama, warga negara dari kelompok minoritas kulit hitam di Amerika Serikat, berhasil terpilih menjadi Presiden AS ke-44. Demokrasi di AS terbukti berhasil memfasilitasi sebuah proses politik yang tidak memandang perbedaan latar belakang suku, agama, maupun ras. Pemilu yang baru saja berlangsung di Amerika Serikat dengan terpilihnya Barack Hussein Obama menjadi presiden, juga merupakan salah satu fakta yang menunjukkan kedewasaan berdemokrasi rakyat Amerika Serikat.

Tentu saja, kedewasaan berdemokrasi hanya akan memberikan arti dan makna apabila diikuti dengan kematangan berpolitik. Pada Pemilu AS yang baru saja berlalu, kedewasaan berdemokrasi rakyat AS nampak jelas diikuti dengan kematangannya dalam berpolitik. Hal itu tercermin dari berbagai fenomena menarik pasca terpilihnya Presiden Barack Hussein Obama. Beberapa di antara fenomena itu antara lain adalah antusiasme masyarakat AS untuk menyambut Presidennya yang baru, meskipun bukan dari kalangan mayoritas. Kemudian juga, pola sikap dari pesaingnya dalam pilpres, yaitu Senator John Mc Cain, yang langsung memberinya ucapan selamat dan menyatakan mendukung sepenuhnya sebagai Presiden AS. Demikian pula, sikap kompetitornya dari partainya sendiri, yaitu senator Hillary Clinton, yang tidak saja menjadi pendukungnya namun juga bersedia menjadi salah satu menterinya.

Sebaliknya, kedewasaan berdemokrasi tanpa diikuti dengan kematangan berpolitik, berpotensi untuk mengurangi makna dan nilai penyelenggaraan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada prinsipnya menyeimbangkan kedewasaan berdemokrasi dengan kematangan berpolitik adalah ditujukan untuk:

1. *Mencegah anarki dan pelanggaran nilai-nilai demokrasi.*
Kedewasaan berdemokrasi tanpa diikuti dengan kematangan berpolitik, sesungguhnya hanya akan melahirkan anarkisme serta berbagai bentuk pertikaian lainnya. Melalui kematangan berpolitik, masyarakat akan sanggup menilai gejolak politik sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinamis, yang harus disikapi dengan lebih arif dan bijaksana. Perbedaan politik tidak boleh menjadikan sesama warga bangsa saling memusuhi satu sama lain. Sebaliknya, ragam perbedaan dalam berpolitik, mulai dari perbedaan ideologi dan konflik kepentingan politik lainnya, harus disikapi sebagai warna-warni yang makin mencerahkan penyelenggaraan kehidupan berpolitik.
2. *Memfasilitasi dan mengakselerasi konsensus untuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.*

Kematangan berpolitik, akan mendorong setiap warga bangsa untuk tidak saja sanggup menerima keputusan-keputusan bersama secara demokratis, namun juga sanggup melaksanakan keputusan-keputusan tersebut secara lugas, konsekuen, dan konsisten. Kematangan berpolitik akan menyadarkan warga bangsa bahwa kedewasaan berdemokrasi yang memberikan pijakan obyektif dan terukur bahwa setiap keputusan yang diambil harus mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, harus diikuti dengan kematangan berpolitik ketika harus menjalankan keputusan-keputusan yang diambil dalam rangkaian proses tersebut. Kematangan berpolitik akan memperbesar tingkat partisipasi partai politik peserta pemilu, lembaga swadaya masyarakat, penggiat dan aktivis demokrasi, maupun masyarakat luas dalam mengawal proses berkesinambungan dalam pembangunan demokrasi.

Di Indonesia, tentu kita harus terus berusaha keras untuk mewujudkan kedewasaan berdemokrasi dan kematangan berpolitik. Penyelenggaraan dua pemilihan umum di era reformasi, yaitu Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 telah menghasilkan konstelasi politik yang memberikan pengaruh positif dalam mempercepat pendewasaan demokrasi dan pematangan kehidupan berpolitik di masyarakat. Mulai dari amandemen UUD 1945 sampai lahirnya beragam undang-undang yang menyentuh hajat hidup rakyat banyak, baik dalam segi ekonomi, politik, maupun sosial. Terlepas dari berbagai gejolak yang timbul di kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kita harus mengakui bahwa kualitas pembangunan demokrasi bangsa Indonesia telah semakin baik.

Penyelenggaraan Pemilu 1999 maupun Pemilu 2004 menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah, DPR, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Partai-Partai Politik peserta Pemilu, dan masyarakat telah berhasil melaksanakan perannya masing-masing dengan pola sikap yang menunjukkan kedewasaan berdemokrasi dan kematangan berpolitik. Sejumlah aktifitas berdemokrasi

pascapemilu, misalnya pemekaran wilayah dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah mulai dari bupati, walikota, dan gubernur yang selama ini telah terlaksana dengan baik.

Sejak tahun 1999 hingga sekarang, telah terbentuk 191 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 153 kabupaten, dan 31 kota. Dengan demikian, jumlah daerah otonom yang ada berjumlah 510 daerah otonom, yang terdiri dari 33 provinsi, 386 kabupaten, dan 91 kota. Kemudian sejak 1 Juni 2005 sampai 20 Agustus 2008, telah berhasil dilaksanakan 414 pemilihan kepala daerah (pilkada), baik pemilihan gubernur, maupun bupati/walikota. Bahkan di akhir tahun 2008 lalu, seluruh gubernur, bupati dan walikota di Indonesia sudah terpilih langsung oleh konstituen di daerah mereka sendiri.

Kita bersyukur bahwa meskipun masih ada sejumlah gejolak kecil, namun harus diakui bahwa proses demokrasi itu secara umum telah berjalan secara efektif, efisien, damai, dan tertib, yang sekaligus menunjukkan makin matangnya bangsa Indonesia dalam berpolitik.

Bahkan saat ini, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat, mekanisme *check-and balances* terus ditumbuhkembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kenegaraan. Saat ini semua lembaga negara merupakan 'kepunyaan' dan 'pilihan' rakyat, bukan lagi kepunyaan dan pilihan penguasa. Pemerintahan yang berjalan demokratis baik di tingkat pusat maupun daerah berhasil dipertahankan serta penyelenggaraannya diarahkan untuk memberikan 'kekuasaan' kepada rakyat untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Ke depan, tentu saja semua prestasi itu harus terus ditingkatkan dan ditumbuhkembangkan. Pemerintah telah berketetapan untuk terus memfasilitasi rakyat Indonesia agar dapat melaksanakan proses perilaku politik yang menuju pada kematangan berpolitik. Dalam kaitan itu, maka pemerintah mengedepankan beberapa prinsip pokok, yaitu:

- Pertama, terus memfasilitasi dan mendorong kedewasaan dalam berperilaku politik melalui pembelajaran politik di masyarakat. Kedewasaan dalam berperilaku politik (*politics behaviour*) diwujudkan pada sikap insan/individu atau kelompok dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Pemerintah telah memfasilitasi hal itu, antara lain, dengan mewajibkan setiap individu/kelompok untuk melakukan hak dan kewajiban politiknya seperti: melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat/pemimpin, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, berhak untuk menjadi pimpinan partai politik, serta berkewajiban untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun baik oleh undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku.
- Kedua, terus mengembangkan demokrasi melalui proses yang menitikberatkan pada partisipasi dan pemberdayaan seluruh masyarakat (*inclusiveness*). Pemerintah juga terus mengedepankan prinsip toleransi dan pembentukan konsensus dibandingkan dengan persaingan dan pertarungan.

Wujud dari pelaksanaan kedua prinsip itu adalah komitmen pemerintah untuk terus mendorong dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kelembagaan partai politik yang berkualitas. Kelembagaan partai politik adalah wahana terpenting dalam mengungkapkan, mereproduksi dan memajukan praktik demokrasi. Partai politik memiliki peran penting dalam mengalihkan nilai-nilai politik dan budaya demokrasi dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk kestabilan penyelenggaraan demokrasi secara tertib dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka ada dua tujuan pokok pendirian partai politik, yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus. Tujuan umum Partai Politik adalah untuk (a). mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b). menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c). mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun tujuan khusus pendirian partai politik adalah: (a). meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b). memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan; (c). membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kaitan dengan perwujudan kematangan berpolitik, UU Nomor 2 Tahun 2008 telah mengamanatkan lima fungsi pokok dari partai politik, yaitu: *pertama*, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; *kedua*, sebagai komponen bangsa yang ikut terlibat aktif dalam penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; *ketiga*, sebagai wahana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; *keempat*, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan *kelima*, sebagai sarana untuk rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Bentuk pendidikan politik yang harus dilaksanakan oleh partai politik tentu disesuaikan dengan ruang lingkup tanggung jawabnya. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik harus memberikan prioritas pada beberapa hal pokok antara lain: keadilan dan kesetaraan gender,

peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui semua upaya itu, maka Insha Allah kematangan berpolitik di tanah air akan dapat terus dipelihara dan ditumbuh-kembangkan. Tentu saja, parameter untuk mengukur kematangan berpolitik itu adalah dengan menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2009 mendatang. Pemerintah, sebagai fasilitator penyelenggaraan kehidupan demokrasi di tanah air, telah bertekad untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2009 dengan sebaik-baiknya.

Mempersiapkan Pemilu 2009 Sebagai Puncak Pembelajaran Politik

Pemilu merupakan ekspresi perilaku politik yang mampu menjadi indikator dalam menunjukkan kematangan berpolitik, mulai dari lingkup individu, komunitas dan golongan, maupun secara nasional. Proses pemilu baik dalam memilih anggota legislatif pusat dan daerah, maupun memilih presiden dan wakil presiden, memerlukan ragam tahapan yang saling berkesinambungan. Mulai dari penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, pembentukan institusi pelaksana dan pengawas pemilu, legalitas partai-partai politik peserta pemilu, penentuan para calon legislatif, penentuan calon presiden dan wakil presiden, sampai penyusunan daftar pemilih yang berhak mengikuti pemilu. Ragam tahapan yang berkesinambungan tersebut merupakan rangkaian proses sebagai sebuah pembuktian berjalannya demokrasi pada jalurnya. Hasil dari rangkaian proses inilah yang menjadi penanda akan kualitas kematangan berpolitik. Dalam Pemilu 2009 yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, jumlah pesertanya mencapai 34 partai politik nasional

yang ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum 2009. Terdiri dari 16 parpol lama yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan 18 parpol baru yang lolos verifikasi faktual. Selain itu masih ditambah lagi dengan 6 partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai peserta Pemilu 2009. Komisi Pemilihan Umum juga telah menetapkan jumlah pemilih untuk Pemilu 2009 sebesar 171.068.667 orang. Jumlah itu berasal dari pemilih dalam negeri dari 33 provinsi sebesar 169.558.775 orang dan pemilih luar negeri dari 117 perwakilan Indonesia di luar negeri sebanyak 1.509.892 orang.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 22 E ayat (5) bahwa pemilihan umum (Pemilu) harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. UUD 1945 hasil amandemen itu telah secara tegas menetapkan bahwa tidak ada lembaga lain yang berhak menyelenggarakan Pemilu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aspek operasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Sesuai dengan amanat UU itu, maka tugas KPU meliputi: penyelenggaraan seluruh tahap pelaksanaan Pemilu sesuai amanat UU 10/2008 tentang Pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, pemetaan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi DPRD setiap daerah otonom, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu, penataan penyelenggaraan kampanye, penetapan tempat pemungutan suara (TPS), pemungutan dan penghitungan suara, pengiriman hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penentuan sistematisasi dan publikasi hasil Pemilu, serta evaluasi penyelenggaraan Pemilu usai dilangsungkannya Pemilu.

Pemerintah yang juga memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan pemilu tentu telah melakukan beragam langkah dan upaya agar Pemilu 2009 dapat berjalan lancar. Pemerintah telah menyediakan anggaran Pemilu 2009 yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran Pemilu 2004 lalu. Pemerintah juga telah mendorong pihak-pihak yang menjadi

pelaksana pemilu mulai dari KPU dan KPUD, Banwaslu dan Panwaslu untuk saling bersinergi. Kemitraan yang selama ini telah terbangun harus diisi dengan sinergi sehingga beragam persoalan yang timbul pada proses dan pelaksanaan pemilu dapat di atasi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, salah satu peran pemerintah yang menonjol, sebagaimana tertuang pada Bab VI Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 adalah sebagai penyedia data pemilih (penduduk). Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2008 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan. Tugas tersebut dibebankan kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Adminduk) Departemen Dalam Negeri. Data penduduk ini sangat diperlukan untuk menyusun instrumen-instrumen selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilu. Data dan informasi tentang perkembangan mutakhir data jumlah penduduk, wilayah administrasi pemerintahan, dan jumlah partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM sangat sangat diperlukan KPU dalam melakukan pemetaan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi DPRD, dan pendaftaran peserta Pemilu.

Untuk mengakselerasi proses pembelajaran politik dikalangan masyarakat, guna terwujudnya kedewasaan berpolitik, maka pemerintah juga telah memfasilitasi berbagai langkah terobosan pada Pemilu 2009 ini. Salah satu langkah terobosan itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan suara terbanyak sebagai penentuan calon legislatif (caleg). Penetapan berdasarkan suara terbanyak ini adalah fitur yang sangat berbeda dibandingkan Pemilu 2004, yang menentukan penetapan caleg berdasarkan nomor urut. Penetapan berdasarkan suara terbanyak memiliki dua tujuan pokok, yaitu, pertama, untuk meningkatkan kualitas keterwakilan anggota legislatif dan; kedua, untuk makin meningkatkan mendekati para pemilih dengan wakil-wakilnya di DPR, DPRD dan DPD.

Penetapan berdasarkan suara terbanyak akan mendorong para anggota legislatif terpilih untuk tetap

mengutamakan kepentingan konstituennya, sehingga mendorong para anggota legislatif terpilih, untuk terus bersinergi dengan kepentingan konstituen di daerah pemilihan (dapil) yang diwakilinya. Dengan cara itu, diharapkan para anggota legislatif terpilih akan makin terdorong untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi dari konstituen yang diwakilinya. Anggota legislatif yang tidak mampu melaksanakan fungsi tersebut, akan menghadapi risiko untuk berhadapan langsung dengan konstituennya sendiri. Dengan mekanisme itu, diharapkan dapat dicapai suatu proses demokrasi partisipatif yang lebih nyata dan lebih efektif, serta memfasilitasi proses pendewasaan politik baik bagi anggota legislatif, maupun konstituennya dari kalangan masyarakat luas.

Selain memfasilitasi terobosan dalam penyelenggaraan Pemilu, maka wujud persiapan pemerintah lainnya adalah mempersiapkan logistik Pemilu. Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke merupakan wilayah yang sangat luas dengan kondisi medan yang berbeda-beda. Melihat pengalaman pelaksanaan Pemilu 2004 yang lalu, untuk pengiriman logistik Pemilu ke beberapa kawasan di tanah air seperti Papua, Sulawesi Utara, Aceh, maupun kawasan perbatasan bukan pekerjaan ringan. Tidak semua jalur transportasi dapat dilalui dengan jalan darat, tetapi juga harus menggunakan pesawat terbang maupun kapal laut. Di sisi lain, kelancaran pelaksanaan Pemilu sangat ditentukan oleh kualitas pengiriman bahan logistik Pemilu sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Keterlambatan dalam pengiriman bahan logistik Pemilu tentu akan mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilu di kawasan yang bersangkutan. Dalam hal itu, wujud dukungan pemerintah terutama adalah dengan mengerahkan segenap jajaran pemerintahan termasuk kesatuan TNI dan Polri untuk mendukung penyaluran dan distribusi logistik Pemilu, sehingga semua logistik Pemilu dapat mencapai TPS tepat pada waktunya.

Selain logistik Pemilu, hal terpenting lainnya yang menjadi tugas pemerintah dalam mendukung

penyelenggaraan pemilu adalah menjaga keamanan dan ketertiban mulai dari awal pelaksanaan Pemilu legislatif sampai dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru. Untuk itu, maka Presiden RI, selaku Kepala Pemerintahan pada Rapat Pimpinan TNI dan Rapat Koordinasi Polri, yang diikuti oleh Panglima TNI dan Kapolri serta segenap jajaran TNI dan Polri pada bulan Januari lalu, telah memberikan dua instruksi penting bagi jajaran TNI dan Polri, yaitu pertama, untuk mengamankan dan melancarkan penyelenggaraan Pemilu 2009, sehingga dapat dilaksanakan secara tertib, teduh dan damai, dan kedua, agar TNI dan Polri bersikap netral dan tidak terlibat dalam semua bentuk politik praktis.

Terciptanya kondisi keamanan yang kondusif, akan mampu membangun dan menciptakan rasa aman bagi semua penduduk, pemerintah daerah, dan petugas Pemilu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing pada perhelatan demokrasi mendatang sehingga akan menjamin berlangsungnya Pemilu yang berkualitas, yang makin baik dibandingkan dengan Pemilu 2004 lalu, sekaligus, makin menunjukkan peningkatan kualitas kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia.

Penutup

Pemilu 2009 merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia. Kualitas penyelenggaraan Pemilu 2009 akan menunjukkan wujud peningkatan kedewasaan berdemokrasi dan kematangan berpolitik bagi bangsa Indonesia. Prestasi penyelenggaraan Pemilu 2004, yang telah menuai berbagai apresiasi dari seluruh penjuru dunia, harus bisa kita tingkatkan kualitasnya, dengan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2009 yang makin baik. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi semua komponen bangsa, untuk menyukseskan Pemilu 2009. Pemerintah telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempersiapkan semua kelengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga telah

mendorong seluruh warga bangsa untuk berpartisipasi dan menggunakan hak politiknya pada Pemilu 2009 mendatang.

Dengan makin majunya kualitas pengembangan tata nilai demokrasi di tanah air, maka setiap warga bangsa harus mampu memanfaatkan momentum Pemilu 2009 itu sebagai bagian dari pendewasaan berpolitik. Pendewasaan berpolitik yang akan makin memperkuat landasan demokrasi untuk membangun negara yang kuat dan bermartabat. Pendewasaan berpolitik yang tidak saja diwujudkan dalam bentuk penyaluran pilihan dan hak politiknya secara cerdas, akan tetapi juga kedewasaan dalam menerima semua hasil kompetisi politik melalui Pemilu, dengan penuh ketulusan, arif dan bijaksana.[]

